

FLYPAPER EFFECT PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH

M. Rizki Fahmi
rizkifahmi3@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the Flypaper Effect at Local Own Source and General Allocation Fund to the Local Expenditure (Study at Local government of district / city at East Java Province. The population of this research used 34 local government of district / city East Java Province. The sample observation periods were in 2014-2016 with the amount of 102 samples. The data collection method used documentation from secondary data through collection, take a note, and data processing related with three years observation in 2014-2016 periods. The data analysis used multiple linear regressions. The research result showed that (1) local own source gave significant and positive influence to the local expenditure; (2) general allocation fund gave significant and positive influence to the local expenditure; and (3) local own source gave grater influence to the local expenditure than general allocation fund to the local expenditure. Therefore this research concluded that three were no Flypaper effect at financial of local government of district / city at East Java during 2014-2016 observation periods.

Keywords: Flypaper effect, local own source, general allocation fund, local expenditure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah 34 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Periode pengamatan sampel yaitu tahun 2014-2016 dengan jumlah sampel sebanyak 102. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode dokumentasi dari data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian selama tiga tahun, yaitu tahun 2014-2016. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. 3) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi *Flypaper Effect* pada keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian yaitu tahun 2014-2016.

Kata Kunci : *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah.

PENDAHULUAN

Untuk memenuhi terlaksananya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin merupakan tujuan utama dari transfer. Transfer antar pemerintah merupakan bentuk dari kebijakan pelaksanaan otonomi untuk mengatasi celah fiskal dan sebagai suatu sumber penerimaan penting pemerintah daerah (Maimunah, 2006). Namun dapat terjadi ketidakefektifan pembiayaan pengeluaran daerah yang diakibatkan pemberian transfer. Kondisi tersebut diketahui sebagai *flypaper effect*.

Kemampuan daerah dalam memenuhi sumber dana dari daerah tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sanggup menciptakan aliran dana untuk pembangunan daerah yang berkesinambungan, dimana hal tersebut diwujudkan dalam pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah juga memberikan pengaruh cukup besar dalam menentukan kemampuan daerah untuk memenuhi aktivitas pemerintah serta program pembangunan daerah (Mentayani *et al.* 2012). Pendapatan asli daerah idealnya merupakan sumber-sumber pendapatan pokok daerah. Mentayani *et al.* (2012) menyebutkan bahwa pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima. Semakin besar pendapatan yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan lewat belanja daerah untuk melaksanakan pemerintah daerah.

Adanya perbedaan potensi, kebutuhan daerah dan sumber daya serta beban fungsi antar tingkat pemerintahan pada setiap daerah di Indonesia (Al Khoiri, 2015). Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan keuangan (*revenue capacity*) yang beragam antar daerah. Dalam mengatasi ketidakseimbangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, maka ditentukan transfer dana perimbangan salah satunya adalah dana alokasi umum (DAU). Terdapat dua faktor utama untuk menentukan besarnya transfer DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Faktor pertama yaitu kebutuhan daerah (*needs*), faktor kedua merupakan kemampuan finansial daerah yaitu kemampuan dasar dalam membiayai belanja daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan DAU (Kurnia dan Annisa, 2013).

Mendanai sepenuhnya urusan pembiayaan daerah dengan menggunakan PAD dapat digunakan untuk dapat menilai kemampuan pemerintah daerah untuk mengatasi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan. Ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi pada pemerintah pusat khususnya pada aspek keuangan menjadi sebuah kondisi yang terlihat jelas pada otonomi daerah di Indonesia. Alokasi transfer DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah lebih tinggi serta kurang memperhatikan kemampuan daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendanaannya. Sehingga berakibat pada ketidakmandirian pemerintah daerah yang terus bergantung pada transfer yang besar yang diberikan pemerintah pusat, sehingga kapasitas fiskal daerah (potensi fiskal) tidak dijalankan dengan maksimal. Rendahnya peran suatu daerah dalam memenuhi belanja daerahnya serta dominannya peran transfer dari pusat yang salah satunya berupa DAU sehingga berakibat ketergantungan, maka fenomena ini disebut *flypaper effect* (Purbarini *et al.* 2015).

Bukannya menggali basis pajak lokal dengan lebih optimal, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat. Hal tersebut diakibatkan karena kemampuan pengumpulan pajak lokal tidak diperhatikan dengan baik karena lebih besarnya konsentrasi dalam mengalokasikan transfer berdasarkan aspek belanja, khususnya pada negara-negara yang sedang berkembang (Purnomo, 2011). Kondisi yang sama juga ditemui dalam kasus pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Data menampilkan proporsi PAD hanya sanggup membiayai belanja pemerintah daerah maksimal sebesar dua puluh persen (Purbarini *et al.* 2015). Permasalahan yang terjadi sekarang, pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Ketika alokasi DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya DAU diperoleh tetap porsi nominalnya.

Menurut Afrizawati (2012) proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling besar dua puluh persen. Ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut dengan *flypaper effect* (Maimunah, 2006). Secara keseluruhan perkembangan keuangan daerah menunjukkan hubungan yang tidak seimbang, dimana perubahan pertumbuhan antara PAD dengan belanja daerah jauh lebih rendah, dibandingkan perubahan pertumbuhan DAU dengan belanja daerah. Hal ini terlihat indikasi kuat perilaku belanja daerah sangat dipengaruhi sumber penerimaan berupa dana transfer yaitu DAU sehingga akan melemahkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri. Berdasarkan pada data PAD, DAU

dan belanja daerah yang berfluktuasi seperti diatas maka kemungkinan besar terjadi *flypaper effect* pada daerah kabupaten/kota, dalam hal ini dilihat dari besarnya nilai DAU daripada nilai PAD.

Penelitian ini akan menganalisa isu-isu mengenai *flypaper effect* pada pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah?; (2) Apakah dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah?; (3) Apakah terjadi *flypaper effect* yang dapat ditunjukkan melalui besarnya pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah, lebih besar dari pada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah?. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *flypaper effect* pada pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

TINJAUAN TEORITIS

Belanja Daerah

Semua pendapatan daerah yang diterima dari daerahnya sendiri ataupun transfer dari pemerintah pusat untuk digunakan dalam memenuhi seluruh pengeluaran daerah itu. Pendapatan daerah tersebut dapat berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah terbagi menjadi dua, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pendapatan Asli Daerah

Halim (2007) menyebutkan bahwa seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, disebut sebagai pendapatan asli daerah. Sumber PAD antara lain adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wewenang pungutan pajak daerah berada di tangan pemerintah daerah. Menurut UU No 28 Tahun 2009, pajak yang dikelola daerah ada dua jenis: Pajak provinsi, terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota, terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat beberapa jenis jasa yang menurut pertimbangan sosial ekonomi yang layak dijadikan sebagai obyek retribusi, jenis jasa tersebut antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Setiyono, 2011). Objek pendapatan ini antara lain bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, penerimaan atas tuntutan ganti rugi, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak dan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Dana Alokasi Umum

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi maka sebagian pendapatan APBN dialokasikan sebagai sumber dana pada dana alokasi umum dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk DAU, dana alokasi khusus/DAK, dan bagi hasil, sedangkan porsi PAD masih relatif kecil (Mardiasmo, 2004). Adapun cara menghitung dana alokasi umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Widodo, 2007). Pertama, DAU ditentukan serendah-rendahnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Kedua, DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing sepuluh persen dan sembilan puluh dari dana alokasi umum sebagaimana di tetapkan di atas. Ketiga, DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Keempat, porsi daerah kabupaten/kota sesuai dengan yang dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Flypaper Effect

Flypaper Effect merupakan kondisi dimana Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat (*unconditional grants*) dibandingkan dengan pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga dapat mengakibatkan pemborosan pada belanja daerah. Transfer tidak bersyarat (*unconditional grants*) yang diprosikan dengan dana alokasi umum ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar

yang dialokasikan secara keseluruhan dari pemerintah pusat. Fenomena *flypaper effect* memberikan dampak bahwa dapat terjadinya peningkatan belanja pemerintah daerah yang lebih besar dibandingkan penerimaan transfer (Turnbull (dalam Hastuti, 2011)). Fenomena *flypaper effect* ini dapat terjadi dalam dua versi (Gorodnichenko (dalam Hastuti, 2011)). Pertama, berdasarkan pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua, mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. *Flypaper effect* merupakan suatu keadaan dimana respon (belanja) dari pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU dibandingkan dengan menggunakan kemampuan sendiri, yang diprosikan dengan PAD. *Flypaper effect* juga digunakan sebagai media untuk memprediksi belanja daerah pada periode yang akan datang. Suatu daerah dengan PAD rendah maupun tinggi tidak menjadi tolak ukur untuk dapat atau tidak dapat terjadinya *flypaper effect* (Maimunah, 2006).

Rerangka Pemikiran

Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *flypaper effect* pada pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka rerangka penelitian sebagai berikut:



Sumber : Data primer diolah tahun 2014-2016

Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Mentayani *et al.* (2012) menyebutkan bahwa pemerintah daerah dalam menganggarkan belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima. Semakin besar pendapatan yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan lewat belanja daerah untuk melaksanakan pemerintah daerah, sehingga penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Perbedaan antara kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*) disebut sebagai celah fiskal (*fiscal gap*). Tinggi rendahnya celah fiskal (*fiscal gap*) digunakan untuk menentukan dana alokasi umum pada suatu daerah. Daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi mendapat jumlah dana alokasi umum yang lebih kecil, sedangkan daerah yang

memiliki kapasitas fiskal rendah justru mendapatkan dana alokasi umum lebih banyak, oleh karena itu penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Flypaper Effect

Penelitian oleh Maimunah (2006) dengan mengambil sampel pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Hasil dari penelitian Maimunah menunjukkan bahwa secara terpisah maupun serempak, DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah, pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih kuat daripada pengaruh PAD. Artinya telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah pada kabupaten/kota di Sumatera. Sehingga penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H₃: Terjadi *flypaper effect* yang dapat ditunjukkan melalui besarnya pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah, lebih besar dari pada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih, yang disebut dengan metode kausalitas (*causal research*) merupakan metode jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2008). Metode pada penelitian ini memiliki sifat pengujian hipotesis mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah, serta hipotesis mengenai *flypaper effect*. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sampel yang dipilih dari populasi dianggap mewakili keberadaan populasi. *Purposive sampling* digunakan sebagai metode pemilihan sampel pada penelitian ini. Ini berarti, populasi yang dijadikan sampel merupakan populasi yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria dalam penentuan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah, pertama, Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama tiga tahun berturut-turut pada periode 2014-2016. Kedua, Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyajikan data realisasi PAD, DAU, dan Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi APBD-nya pada periode 2014-2016.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja daerah pada tahun anggaran 2014 sampai 2016. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan, pengumpulan, pencatatan, dan perhitungan data-data yang diperoleh. Selain menggunakan metode dokumentasi, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi pustaka yang dilakukan dengan membaca dan mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik dari buku, arsip maupun hasil penelitian terdahulu.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel bebas (*independent variable*) yang digunakan adalah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang penerimaannya diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Mardiasmo, 2004). Di dalam penjelasan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari empat jenis pendapatan, antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi maka sebagian pendapatan APBN dialokasikan sebagai sumber dana pada dana alokasi umum dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Variabel terikat (*dependent*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja daerah. Belanja daerah merupakan beban daerah yang dikeluarkan dalam periode tertentu. Terdapat dua jenis belanja daerah, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai (honorarium atau upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga (Nordiawan *et al.* 2012).

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui banyaknya data yang diolah, nilai minimum dan maksimum data, nilai tengah atau rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja daerah.

Pengujian Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah persyaratan dari uji asumsi klasik telah terpenuhi. Adapun model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BD = \alpha + \beta PAD + \beta DAU + e$$

Keterangan:

BD	: Belanja Daerah
α	: Konstanta
β	: Slope atau koefisien regresi
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DAU	: Dana Alokasi Umum
e	: Error.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini lolos dari uji asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Uji normalitas data adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011:160). Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka dapat diuji dengan metode *Kolmogorov Smirno*. Menurut Santoso (2011:214), dasar pengambilan keputusan yaitu, pertama, jika nilai probabilitas > 0.05,

maka data berdistribusi secara normal. Kedua, jika nilai probabilitas < 0.05 , maka data tidak berdistribusi secara normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas) atau tidak (Ghozali, 2011). Cara yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya multikolinearitas adalah dengan cara menggunakan uji *variance inflation factor* (VIF) (Ghozali, 2011:106). Deteksi adanya multikolinearitas adalah sebagai berikut: Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas, Jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka terjadi multikolinearitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Jika terjadi korelasi, maka akan terdapat masalah autokorelasi. Munculnya autokorelasi dikarenakan adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah menggunakan uji *Durbin Watson* (DW). Kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut: Jika DW < -2 , maka bermakna autokorelasi positif, Jika $-2 < dw < 2$, maka bermakna tidak ada autokorelasi, dan Jika DW > 2 , maka bermakna autokorelasi negatif.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2011:139). Pengujian ada tidaknya heterokedastisitas dalam model regresi dapat diketahui dari pola gambar *Scatterplot* antara lain prediksi variabel independen (ZPRED) dengan variabel residualnya (SRESID). Analisis pada gambar *Scatterplot* yang mengatakan model regresi linier berganda tidak terdapat heteroskedastisitas, jika: Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah sekitar angka 0, titik-titik hanya mengumpul di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, dan penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji F (Uji Kelayakan Model/*Goodness of Fit*), Koefisien Determinasi (R^2), dan Uji t. Uji F (Uji Kelayakan Model/*Goodness of Fit*) dan Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk menguji model regresi yang digunakan pada penelitian ini, sedangkan Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel dependen.

Uji statistik F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model, layak untuk diuji lebih lanjut. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Jika probabilitas (sig.) $> \alpha = 0,05$ maka model tidak layak, dan jika probabilitas (sig.) $< \alpha = 0,05$ maka model layak.

Koefisien determinasi bertujuan untuk menentukan proporsi atau presentase total variasi dalam variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabilitas variabel dependen (Ghozali, 2011).

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel.

Berdasarkan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Jika probabilitas (sig.) $< \alpha = 0,05$ maka H_a diterima, H_0 ditolak, dan jika probabilitas (sig.) $\alpha > 0,05$ maka H_a ditolak, H_0 diterima.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BD	102	612859578584.0	7151661549430.5	1957252874108.065	1049826820278.3710
DAU	102	380779789000.0	1709892945000.0	927966944646.872	298123082052.5112
PAD	102	80493920959.5	4090206769387.5	386857851061.605	639611941363.7110
Valid N (listwise)	102				Reliabel

Sumber : Data primer diolah tahun 2014-2016

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa PAD memiliki nilai minimum Rp 80.493.920.959 selama tiga tahun periode penelitian dimiliki oleh Kota Batu pada tahun 2014. PAD memiliki nilai maksimum Rp 4.090.206.769.387 selama tiga tahun periode penelitian tersebut. PAD tertinggi tersebut dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2016. Kota PAD memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 386.857.851.061 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 639.611.941.363. Nilai standar deviasi PAD lebih besar dibandingkan nilai rata-rata (*mean*), maka dapat dikatakan bahwa distribusi data pada PAD cenderung tidak normal.

Dana alokasi umum mempunyai nilai minimum Rp 380.779.789.000 selama tiga tahun periode penelitian dimiliki oleh Kota Mojokerto pada tahun 2014. Dana alokasi umum memiliki nilai maksimum Rp 1.709.892.945.000 selama tiga tahun periode penelitian tersebut. Dana alokasi umum tertinggi tersebut dimiliki oleh Kabupaten Jember pada tahun 2016. Dana alokasi umum memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 927.966.944.646 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 298.123.082.052. Nilai standar deviasi dana alokasi umum lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (*mean*), maka dapat dikatakan bahwa distribusi data pada dana alokasi umum normal.

Belanja daerah memiliki nilai minimum Rp 612.859.578.584 selama tiga tahun periode penelitian. Belanja daerah terendah tersebut dimiliki oleh Kota Batu pada tahun 2014. Belanja daerah memiliki nilai maksimum Rp 7.151.661.549.430 selama tiga tahun periode penelitian tersebut. Belanja daerah tertinggi tersebut dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2016. Belanja daerah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 1.957.252.874.108 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 1.049.826.820.278. Nilai standar deviasi belanja daerah lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (*mean*), maka dapat dikatakan bahwa distribusi data pada belanja daerah normal.

Pengujian Regresi Linear Berganda

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-49181873105.816	62279946308.727		-0.790	0.432
PAD	1.192	0.031	0.726	38.230	0.000
DAU	1.665	0.067	0.473	24.900	0.000

a. Dependent Variable : Belanja Daerah

Sumber : Data primer diolah tahun 2014-2016

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh persamaan regresi linear berganda yang signifikan sebagai berikut :

$$BD = -49181873105,816 + 1,192 PAD + 1,665 DAU + e$$

Keterangan :

BD : Belanja Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

e : Error

Berdasarkan dari model persamaan regresi di atas, dapat di implementasikan sebagai berikut :

Konstanta merupakan *intersep variable* terikat jika variabel bebas = 0,432 hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model penelitian sebesar konstanta tersebut. Nilai konstanta adalah sebesar -49181873105,816 menunjukkan bahwa jika variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum = 0,432 atau konstan, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan sebesar -49181873105,816.

Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah, nilai dari variabel pendapatan asli daerah adalah sebesar 1,192 yang artinya jika pendapatan asli daerah naik satu satuan, dengan anggapan variabel lainnya tetap, maka belanja daerah akan naik sebesar 1,192. Sedangkan koefisien regresi variabel dana alokasi umum, nilai variabel dana alokasi umum adalah sebesar 1,665 yang artinya jika dana alokasi umum naik satu satuan, dengan anggapan variabel lainnya tetap, maka belanja daerah akan naik sebesar 1,665.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011:160). Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka dapat diuji dengan metode *Kolmogrov Smirnov*.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-0.0001858
	Std. Deviation	188227417438.38870000
Most Extreme Differences	Absolute	0.079
	Positive	0.079
	Negative	-0.034
Test Statistic		0.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.122 ^c

Sumber : Data primer diolah tahun 2014-2016

Berdasarkan tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa hasil uji normalitas residual yang diketahui nilai signifikansi *Test Statistic Kolmogrov-Smirnovi* sebesar 0,079 dan nilai *Asymptotic Significant* sebesar 0,122 dimana nilai *Asymptotic Significant* lebih besar dari 0,05 yang artinya data tersebut terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Collinearity Statistics		
Variabel	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	0,900	1,111
DAU	0,900	1,111

Sumber : Data primer diolah tahun 2014-2016

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas) atau tidak (Ghozali, 2011). Cara yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya multikolinieritas adalah dengan cara menggunakan uji *variance inflation factor* (VIF) (Ghozali, 2011:106). Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa variabel independen pendapatan asli daerah memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,900 dan dana alokasi umum memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,900, sehingga tidak ada variabel independen yang mempunyai nilai *Tolerance* lebih kecil dari 0,1. Selain itu diketahui juga variabel independen pendapatan asli daerah memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,111 dan dana alokasi umum memiliki nilai VIF sebesar 1,111, sehingga variabel independen pada penelitian tersebut memiliki nilai VIF dibawah 10. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak memiliki adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

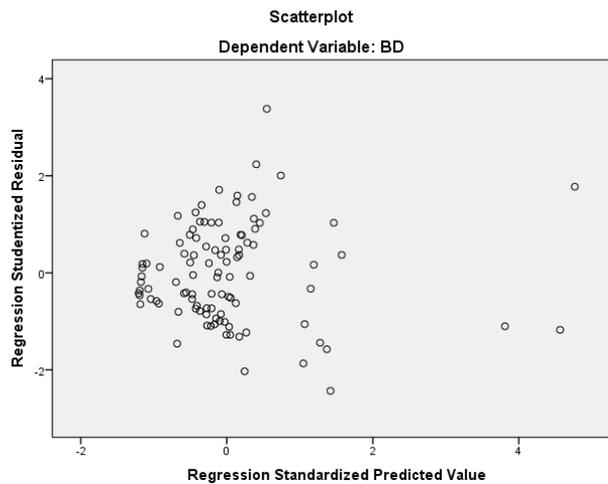
Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	0.984 ^a	0.967	1.561

Sumber : Data primer diolah tahun 2014-2016

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji yang digunakan untuk mengetahui terjadinya autokorelasi adalah menggunakan uji *Durbin Watson* (DW). Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil uji autokorelasi, dimana diketahui nilai *Durbin Watson* sebesar 1,561 yaitu berada diantara -2 sampai dengan +2 yang bermakna tidak ada autkokorelasi dalam regresi.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data primer diolah tahun 2014-2016

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Grafik *Scatterplot*, dimana pada grafik tersebut terlihat bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Uji F (Uji Kelayakan Model/*Goodness of Fit*)

Tabel 6
Hasil Uji Kelayakan Model
Koefisien Determinasi

Model	Sum of Squares	ANOVA ^a			
		Df	Mean Square	F	Sig
Regression	1077373859819272100000000000	2	53868692990963610000000000	1490.337	0,00 ^b
Residual	35783856282281740000000000	99	36145309376042162000000		
Total	1113157716101554000000000000	101			

a. Dependent Variabel : BD

b. Predictors : (Constant), PAD, DAU

Sumber : Data primer diolah tahun 2014-2016

Dari hasil output SPSS diatas dapat dilihat bahwa hasil uji kelayakan model/*goodness of fit* menunjukkan nilai F hitung sebesar 1490,337 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat disimpulkan model yang digunakan pada penelitian ini layak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,984 ^a	0,968	0,967	190119197810.3268

Sumber : Data primer diolah tahun 2014-2016

Tabel 7 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi dimana diketahui nilai *R Square* sebesar 0,968 atau 96,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa 96,8% perubahan belanja daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, sedangkan 3,2% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji t (Uji Statistik t)

Tabel 8
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-49181873105.816	62279946308.727		-0.790	0.432
PAD	1.192	0.031	0.726	38.230	0.000
DAU	1.665	0.067	0.473	24.900	0.000

a. Dependent Variable : Belanja Daerah

Sumber :Data primer diolah tahun 2014-2016

Tabel 8 menunjukkan hasil uji t, diketahui variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai t hitung sebesar 38,230 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 , dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 0,05$). Artinya variabel pendapatan asli daerah dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja daerah, dengan demikian hipotesis yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah dinyatakan diterima.

Diketahui juga pada Tabel 9, variabel dana alokasi umum memiliki nilai t hitung sebesar 24,900 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 , dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 0,05$). Artinya variabel dana alokasi umum dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja daerah, dengan demikian hipotesis yang menyatakan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah dinyatakan diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang penerimaannya diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Mardiasmo, 2004). Di dalam penjelasan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari empat jenis pendapatan, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah memiliki nilai t hitung sebesar 38.230 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 , dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 0,05$). Artinya variabel pendapatan asli daerah dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja daerah, dengan demikian hipotesis yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah dinyatakan diterima. Artinya apabila semakin tinggi nilai pendapatan asli daerah maka semakin tinggi juga nilai dari belanja daerah, dan sebaliknya apabila semakin rendah nilai pendapatan asli daerah maka semakin rendah juga nilai dari belanja daerahnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat dari Mentayani *et al.* (2012) yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dalam menganggarkan belanja daerah disesuaikan

dengan pendapatan daerah yang diterima. Semakin besar pendapatan yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan lewat belanja daerah untuk melaksanakan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi maka sebagian pendapatan APBN dialokasikan sebagai sumber dana pada dana alokasi umum dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Sebagian daerah masih ada yang sangat bergantung terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan program kerjanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Pusat memberikan dana alokasi umum kepada setiap daerah yang bertujuan untuk menanggulangi ketimpangan fiskal antar daerah agar setiap daerah dapat memenuhi belanja daerahnya.

Dana alokasi umum memiliki nilai t hitung sebesar 24.900 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 0,05$). Artinya variabel dana alokasi umum dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja daerah, dengan demikian hipotesis yang menyatakan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah dinyatakan diterima. Artinya apabila semakin tinggi nilai dana alokasi umum maka semakin tinggi juga nilai dari belanja daerah, dan sebaliknya apabila semakin rendah nilai dana alokasi umum maka semakin rendah juga nilai dari belanja daerahnya.

Dana alokasi umum diberikan dalam upaya Pemerintah Daerah untuk menanggulangi ketimpangan fiskal antar daerah agar setiap daerah dapat memenuhi belanja daerahnya. Peranan dana alokasi umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah.

Flypaper Effect

Flypaper effect merupakan suatu keadaan dimana respon (belanja) dari pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU dibandingkan dengan menggunakan kemampuan sendiri, yang diprosikan dengan PAD (Maimunah, 2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dinyatakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Besarnya pengaruh antara masing-masing variabel independen tersebut terhadap belanja daerah sebagai variabel dependen dapat diprosikan melalui besarnya nilai t hitung. Diketahui bahwa dana alokasi umum memiliki nilai t hitung sebesar 24.900, sedangkan pendapatan asli daerah memiliki nilai t hitung sebesar 38.230. Sehingga terlihat bahwa nilai t hitung dana alokasi umum lebih kecil dibandingkan nilai t hitung pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah lebih besar dari pada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dinyatakan ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa *flypaper effect* tidak terjadi pada keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur periode tahun 2014-2016.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *flypaper effect* pada pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pendapatan asli daerah dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja daerah, artinya apabila semakin tinggi nilai pendapatan asli daerah maka

semakin tinggi juga nilai dari belanja daerah, dan sebaliknya apabila semakin rendah nilai pendapatan asli daerah maka semakin rendah juga nilai dari belanja daerahnya. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang juga merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Indikator penting keberhasilan kemampuan keuangan daerah tercermin dalam kemampuan suatu daerah dalam menggali pendapatan asli daerahnya untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan di daerah tersebut.

Dana alokasi umum dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja daerah, artinya apabila semakin tinggi nilai dana alokasi umum maka semakin tinggi juga nilai dari belanja daerah, dan sebaliknya apabila semakin rendah nilai dana alokasi umum maka semakin rendah juga nilai dari belanja daerahnya. Dalam rangka desentralisasi, pemerintah pusat memberikan transfer kepada setiap daerah dengan tujuan untuk terjadi kesetaraan kemampuan keuangan antar daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya, transfer tersebut disebut dengan dana alokasi umum. Sebagian daerah masih ada yang sangat bergantung terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan program kerjanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Pusat memberikan dana alokasi umum kepada setiap daerah yang bertujuan untuk menanggulangi ketimpangan fiskal antar daerah agar setiap daerah dapat memenuhi belanja daerahnya.

Pengaruh dana alokasi Umum terhadap belanja daerah, tidak lebih besar dari pada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Pernyataan tersebut disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan nilai t hitung pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan t hitung dana alokasi umum. Artinya dapat disimpulkan bahwa *flypaper effect* tidak terjadi pada keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur periode tahun 2014-2016.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka saran yang diberikan adalah: Pertama, diharapkan agar Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerahnya agar otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik, serta Pemerintah Daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai pedoman untuk melakukan penganggaran belanja daerah agar dapat terealisasi dengan efektif dan efisien. Kedua, penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian atas penelitian yang akan datang, dan diharapkan agar dapat menambahkan variabel-variabel lain yang belum dimasukkan pada penelitian ini, serta diharapkan penelitian yang akan datang dapat menggunakan data penelitian yang lebih baru (periode penelitian yang berbeda) atau menggunakan objek penelitian yang berbeda agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizawati. 2012. Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi* 2(1).
- Al Khoiri, R. H. 2015. Flypaper Effect dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Barat. *Signifikan* 4(2).
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Penerbit Salemba Empat. Bogor.
- Hastuti, I. 2011. Analisis Flypaper Effect Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada Kota Dan Kabupaten Semarang). *Tesis*. Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.

- Kuncoro, H. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Kurnia, E. D. dan C. F. Annisa. 2013. Analisis Flypaper effect Berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi kasus pada kabupaten/kota di Jawa Timur). *Jurnal Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Malang* 1(2).
- Maimunah, M. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi UMUM (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi*. Padang.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mentayani, I., H. Nurul, dan Rusmanto. 2012. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kota dan Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Spread* 2(1).
- Nordiawan, D., I. S. Putra, dan M. Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Purbarini, E., N. Gregorius, dan Masdjojo. 2015. Flypaper Effect on Operating Expenditure and Capital Expenditure of the City Government in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16 (1):75-84.
- Purnomo, H. B. 2011. Flypaper Effect Pada Pengeluaran Transfer Tidak Bersyarat dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/kota di Kalimantan Tahun 2007-2010. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran. Bandung.
- Santoso, S. 2011. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Cetakan Keempat, PT Elex Media Komputio. Jakarta.
- Setiyono, N. 2011. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008 dan 2009. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Widodo, P. T. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali. (Studi pada Kabupaten/Kota di Bali). *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.